

## **PENENTU SEKTOR UNGGULAN DALAM PEMBANGUNAN (STUDI KASUS DI KABUPATEN MUARATARA SUMATERA SELATAN)**

**Sukamto**

*UIN Sunan Ampel Surabaya  
musfiqohzuhroh@yahoo.co.id*

### **ABSTRAK**

Perjalanan panjang pembentukan daerah Otonom baru (DOB) Muratara, akhirnya mencapai titik terang, namun masih terkendala soal tapal batas. Peta batas Muratara dengan Mura dan Provinsi Jambi, sudah selesai. Menteri Dalam Negeri yang memfasilitasi antara provinsi Sumatera Selatan dengan Provinsi Jambi dan antara Muratara dengan Kabupaten Surolangun berjalan lancar dan tepat waktu. Sengketa suban jadikan Pembentukan Muratara kembali terhambat karena DPR RI mengusulkan kasus itu harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum Musi Rawas Utara terbentuk. Masyarakat sebagai pelaku dalam pembangunan menempati posisi penting. Pembangunan akan bisa bergerak maju jika masyarakat ikut serta mendukung dalam percepatan. Masyarakat yang diberikan keterampilan sesuai dengan minat menjadi duta pada sektor lahan masing-masing. Ditambah dengan pendampingan yang intensif akan melahirkan pejuang-pejuang ekonomi daerah yang tangguh. Perencanaan pembangunan berdasarkan perwilayahan komoditas dapat mengatasi persaingan jenis komoditas antar wilayah. Identifikasi dan analisa potensi wilayah perlu dilakukan awal dalam rangka pengembangan ekonomi wilayah yang merupakan informasi awal dalam merumuskan atau mempersiapkan strategi pengembangan potensi yang ada. Karet dan kelapa sawit merupakan dua komoditas perkebunan potensial yang diandalkan di kabupaten Muratara dengan luas areal tanam sebesar 66.595,00 ha dan hasil produksi mencapai 6623.293,00 ton. Untuk potensi unggulan karet dengan luas areal tanam 6.520,00 ha dan yang dapat menghasilkan 7.216,00 ton per tahunnya. Perkebunan ini meliputi perkebunan plasma yang dikelola oleh penduduk lokal dan perusahaan yang dikelola perusahaan pengelola seperti PT. London Sumatra, PT. Maju Perkasa Sawit, PT. Indo Kebun Unggul. Potensi tanaman unggul tersebut dapat mengatasi dampak ekonom sehingga mampu meningkatkan nilai produksi dan dapat memberikan nilai tambah serta menyerap banyak tambahan tenaga kerja.

Kata kunci: *masyarakat, potensi lokal, perekonomian daerah*

### **1. PENDAHULUAN**

Pembangunan ditengarai dengan pengembangan sektor-sektor riil yang ada dan terjadi dalam masyarakat itu sendiri. Pengembangan sektor unggulan alternatif yaitu, sektor perkebunan, pertanian, perikanan, pertambangan dan sektor industri. Pengolahan sektor unggulan dapat dilihat dan dikaji dari potensi lokal yang dimiliki. Kabupaten muratara (musi rawas utara) adalah kabupaten baru di propinsi sumatra selatan yang usianya 5 tahun berjalan sejak tahun 2013. Di kabupaten maratara ini perkembangan sektor perkebunan lebih dominan, meliputi komoditas tanaman karet dan kelapa sawit, merupakan yang terpenting dalam perekonomian karena merupakan penyumbang terbesar, yaitu sekitar 50,79% bagi produk domestik regional bruto (pdrb) sementara tanaman bahan kedua (14,74% dari pdrb) setelah pertanian (24,09%),(ABIDIN. TAUFIK. Z., 2017).

Pengembangan dan penambahan kapasitas produksi karet dan sawit tidak akan lepas dari pembangunan infrastruktur yang memadahi. Infrastruktur pendukung harus dibenahi, seiring dengan

mulai beroperasinya pabrik-pabrik baru, masalah infrastruktur yang diyakini dapat menumbuhkan perekonomian ke arah positif dan lebih cepat lagi. Penekanan pentingnya infrastruktur sebagai penunjang untuk pengembangan kawasan-kawasan industri pengolahan seperti kawasan ekonomi yang nantinya akan difokuskan untuk industri pengolahan kelapa sawit dan karet.

## **2. DINAMIKA MASYARAKAT MUARATARA**

Masyarakat Muaratara bertempat tinggal di Kabupaten Musirawas Utara. Kabupaten Musirawas Utara sebagai daerah otonomi baru (DOB) telah memiliki administrasi pemerintahan, batas wilayah kabupaten dengan warga masyarakatnya yang bermukim di wilayah daerah aliran Sungai Rupit dan Sungai Rawas, ternyata telah lama ter-arsip dalam perjalanan sejarah bangsanya. Sejak Tahun 1825 Kesultanan Palembang jatuh ketangan Belanda, dan wilayah Rawas masuk dalam Keresidenan Palembang dengan status *Onder-afdeling* Rawas, ber Ibukota di Surulangun (Rawas), Rawas adalah bagian dari Wilayah Afdeling Palembangsche Bovenlanden berkedudukan di Lahat. Pada tanggal 20 April 1943 oleh Pemerintahan Pendudukan Jepang *Onder-Afdeling* Rawas diganti dengan nama "Rawas Gun". Sejak kemerdekaan Republik Indonesia 1945, Rawas Gun berganti nama lagi menjadi "Kewedanan" dan ibukota di Surulangun (Rawas), dan sempat juga ibukotanya di Muara Rupit. Sejak Jaman Pendudukan Jepang wilayah Kewedanan Rawas dan Kewedanan Musi Ulu disatukan menjadi Kabupaten Musi Ulu Rawas (Musi Rawas).

Kabupaten Musi Rawas Utara yang wilayahnya dilewati oleh Sungai Rupit dan Sungai Rawas sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB), hasil pemekaran dari Kabupaten Induk: Kabupaten Musi Rawas adalah Kabupaten terlahir dari kesejarahan wilayah, budaya, bahasa daerah, adat istiadat dan administrasi pemerintahan daerah yang telah berjalan puluhan tahun ditengah-tengah masyarakat dan telah diakui serta tercatat dalam perjalanan sejarah pemerintahan republik Indonesia. Dalam sejarah singkat terbentuknya kabupaten musirawas utara bermula dari keinginan masyarakat Rupit Rawas waktu itu Kewedanan Rawas untuk memisahkan diri dari Kabupaten Musi Rawas sudah dimulai sejak tahun 1960. Pada tanggal 5 agustus 1967 Panitia Besar Persiapan Kabupaten Musi Rawas di muara rupit memberikan surat mandat kepada Panitia Besar Persiapan Kabupaten Rawas Konsulat Palembang untuk mengadakan rapat persiapan pembentukan Kabupaten Rawas. Berdasarkan surat mandat tersebut diadakan rapat pada tanggal 27 Agustus 1967 di Markas Daerah Legiun Veteran RI Sumatera Selatan. Rapat tersebut dihadiri oleh masyarakat Rawas yang berada di Kota Palembang beserta pengurus dan anggota IPPM – MURA Palembang. Tugas dari Panitia Besar Persiapan Kabupaten Rawas Konsulat Palembang yaitu : menampung tuntutan rakyat Rawas yang menuntut Ex. Kewedanan Rawas dijadikan Kabupaten Rawas. Mengolah dan merumuskan tuntutan rakyat Rawas tersebut mengajukan tuntutan rakyat Rawas tersebut pada pihak yang berwenang.

Keinginan tersebut banyak menemui hambatan dan kendala, tetapi generasi penerus tidak tinggal diam, pada tahun 2004 dibentuklah Presidium Persiapan Kabupaten Musi Rawas Utara (PPK MURATARA). PPK MURATARA tersebut beberapa kali disempurnakan komposisi pengurusannya. Pada bulan april 2005 lebih kurang 3000 masyarakat dari 7 kecamatan di wilayah Muratara menyampaikan aspirasinya ke DPRD dan Pemkab Musi Rawas. Masyarakat menuntut pemekaran segera diwujudkan. Masyarakat diterima oleh ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas Drs. HA. Karim AR, Bupati Musi Rawas Ir. Ibnu Amin, M.Sc, Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas Drs. HM. Syarif Hidayat, MM dan disepakati Bupati dan Ketua DPRD menugaskan sekda sebagai ketua tim dengan tugas memperbaharui semua administrasi dan kelengkapan pemekaran Kabupaten Musi Rawas. Dalam tempo 15 hari hasil kerja tim telah disampaikan kepada DPRD Kabupaten Musi Rawas dan dibentuk Pansus pembahasan Pemekaran Kabupaten Musirawas.

Tahun 2007 masyarakat di wilayah Musi Rawas Utara kembali melakukan demonstrasi dengan jumlah yang lebih besar lagi lebih kurang sekitar 7000 massa mendatangi kantor DPRD dan kantor bupati Musi Rawas. Masyarakat diterima oleh Bupati Musi Rawas Ridwan Mukti dan ketua beserta anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas. Masyarakat menuntut agar Bupati segera menyetujui pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara. Pada saat demonstrasi tersebut massa terpancing melempari kaca gedung DPRD karena merasa dilecehkan oleh orasi Bupati Musi Rawas. Karena situasi semakin memanas Bupati diamankan ke dalam gedung DPRD. Selanjutnya ribuan masyarakat tersebut bergerak menuju kearah perbatasan Muratara dengan kabupaten Musi Rawas didekat jembatan air dulu. Masyarakat menutup jalan lintas sumatera dan tetap menuntut pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara. Pada saat itu disepakati dalam surat perjanjian yang ditulis tangan oleh Ir. Arjuna Jipri, ditandatangani oleh wakil dari Pemkab Musi Rawas, Unsur Muspida, Ketua DPRD dan Ketua Presidium, sepakat membuka jalan lintas dan Bupati Musi Rawas menandatangani persetujuan Pemekaran Kabupaten Musirawas Utara. Usaha tersebut belum juga berjalan mulus, maka Presidium menemui Gubernur, Kapolda dan Pangdam. Sementara Tokoh-tokoh Muratara mendatangi Bupati Musi Rawas di rumah dinas (pendopo kabupaten) untuk menandatangani persetujuan pemekaran Kabupaten Musi Rawas Utara. Terbentuknya Kabupaten Musi Rawas Utara terus diperjuangkan melalui berbagai cara dan pada puncaknya terjadilah bentrokan tersebut. Pada saat inilah muncul Peristiwa Terjadinya Bentrokan, rentetan waktu yang begitu panjang untuk menunggu dan berharap, setidaknya dari lahirnya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Musi Rawas Nomor : 12/KPT/DPRD/2005 tanggal 3 september 2005 tentang Persetujuan usul Pemekaran Kabupaten Ex. Kewedanaan Rawas, mengakibatkan warga masyarakat Musi Rawas Utara lelah menunggu dan menanti, pertanyaan selalu "menggema", kapan kabupaten DOB Musi Rawas Utara disetujui dan disahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia bersama DPR RI, (Dubois, 2018).

Ditengah-tengah ketidakpastian, terlambat dan tersendatnya komunikasi public pemerintah pusat dan daerah, kepada warga masyarakat tentang kepastian waktu, kapan RUU DOB Kabupaten Musi Rawas Utara disetujui dan disahkan menjadi undang-undang oleh pemerintah RI. Hari senin tanggal 23 April 2013, terjadilah pemblokadean jalan Lintas Sumatera (jalinsum) dengan cara membakar ban-ban bekas sebagai bentuk tuntutan, protes, warga masyarakat Musi Rawas Utara, agar Kabupaten Musi Rawas Utara segera lahir dan disahkan.. dalam waktu singkat hari itu juga, aksi ini menutup total akses lalu lintas jalan Negara, yaitu jalur yang menghubungkan Jambi, Palembang dan Bengkulu. Bahkan keinginan polisi agar warga membuka sebagian jalan yang diblokir justru dibalas dengan lemparan batu, secara missal dan menyatu. Menjelassore, aksi warga masih berlangsung. Mereka menyatakan baru akan membuka blokade bila Gubernur dan Menteri Dalam Negeri RI datang menemui warga. Aksi tetap berlangsung hingga malam hari. Pukul 20.00 WIB, Wakil Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang datang membujuk warga untuk membuka blokir jalan, juga tidak digubris, gambaran nyata saat itu warga yang sudah larut dalam semangat, emosi dalam satu tuntutan, Kabupaten kami harus mekar dan lahir. Sekitar pukul 21.00 WIB, senin malam Kapolres Musi Rawas kembali meminta massa membubarkan diri. Namun ribuan warga justru merapat dalam posisi berhadap-hadapan. Letusan yang diduga berasal dari senjata api terdengar. Aksi sempat mereda. Tapi, justru satu jam kemudian, massa dengan beringas kembali melempari petugas. Bentrokan tak dapat dihindari. Kemarahan warga sudah tidak terkendali lagi, setelah mereka mengetahui ada empat orang yang meninggal dalam bentrokan itu diyakini karena peluru pihak aparat yang berusaha membubarkan massa. Massa yang marah kemudian merusak dan membakar markas Polsek Muara Rupit. Dua mobil, satu sepeda motor dan sejumlah rumah di asrama polisi ikut mereka hancurkan. Mereka juga lalu membakar dua mobil patrol polisi dan markas Polsek Rupit. Dalam kejadian itu puluhan demonstran mengalami luka-luka, 4 orang meninggal dunia, dan 6 polisi mengalami cedera. Para korban demonstran yang meninggal dunia adalah mikson (35), Apriyanto (18), Suharto (18), Fadilah (40) semuanya warga muratara. Empat korban yang tewas akibat penembakan dalam bentrokan antara demonstran dan pihak aparat tersebut, dimakamkan keesokan

hari, Selasa siang, 30 April 2013. Sementara itu, belasan korban luka-luka lainnya dirawat di rumah sakit terdekat di Lubuk Linggau dan Rumah Sakit, Puskesmas terdekat. Para korban yang meninggal dan luka-luka adalah para pejuang pemekaran Kabupaten Musi Rawas Utara dan Warga Masyarakat Musi Rawas Utara, akan mematrikan nama-nama mereka sebagai pejuang dalam perjalanan sejarah berdirinya, mengisi pembangunan kabupaten DOB Musi Rawas Semangat dan pengorbanan para pejuang berdirinya kabupaten Musi Rawas Utara, dimotori oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh Presidium pemekaran Kabupaten Musi Rawas Utara, para pejuang baik yang berada di jajaran legislatif, eksekutif dipemerintahan Kabupaten Musi Rawas dan Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional, bahwa sejarah perjalanan penuh pengorbanan ini adalah "Amunisi Semangat" untuk menjadikan Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai Kabupaten yang bermartabat, makmur dan lestari, untuk warga Musi Rawas Utara dan rakyat Indonesia.

Setelah Peristiwa Bentrokan Pada tanggal 30 April 2013 jalan lintas Sumatera dan 2 buah jembatan masih ditutup oleh masyarakat. Gubernur sumsel Bapak Ir. Alex Noerdin yang pagi harinya masih berada di Jakarta mengikuti acara Musrenbangnas meminta izin kepa Presiden untuk kembali dan datang ke Muara Rupit. Pada pukul 16.00 WIB rombongan Gubernur mendarat di Bandara Silampari Lubuk Linggau. Gubernur didampingi Pangdam II Sriwijaya Bapak Mayjen TNI Nugroho Widyotomo langsung menuju Muara Rupit. Situasi Muara Rupit masih mencekam, dengan pengawalan Dandim 0406 Mura Letkol CZI Widyo Hartanto dan anggota beserta tokoh-tokoh masyarakat yang dari pagi menunggu Gubernur Sumsel Bapak Ir. Alex Noerdin. Gubernur dan Pangdam menemui salah satu keluarga korban di rumah duka untuk menyampaikan bantuan kepada keluarga korban dan ketiga korban lainnya. Gubernur selanjutnya menemui masyarakat di simpang empat jalan Lintas Sumatera Muara Rupit dan dihadapan ribuan masyarakat Muratara Gubernur meminta Jalan Lintas dibuka demi kepentingan masyarakat banyak. Gubernur menjamin dan bertanggungjawab Kabupaten Musi Rawas Utara akan menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB). Ribuan masyarakat menyambut baik dan meneriakkan yel-yel "Hidup Gubernur", "Hidup Pangdam". Pada pukul 18.30 WIB Gubernur beserta rombongan pulang ke Palembang. Situasi Muara Rupit mulai kondusif, Jalan Lintas Sumatera dibuka oleh masyarakat dan arus lalu lintas kembali normal. Pada hari ketiga setelah itu, Kapolda Sumsel Bapak Irjen Saud Usman Nasution didampingi Dandim 0406 Mura dan tokoh-tokoh Muratara menyembelih 1 (satu) ekor kerbau tanda perdamaian di simpang empat Jalan Lintas Sumatera Muara Rupit.

Perjalanan panjang pembentukan daerah Otonom baru (DOB) Muratara, akhirnya mencapai titik terang, namun masih terkendala soal tapal batas. Peta batas Muratara dengan Mura dan Provinsi Jambi, sudah selesai. Menteri Dalam Negeri yang memfasilitasi antara provinsi Sumatera Selatan dengan Provinsi Jambi dan antara Muratara dengan Kabupaten Surolangun berjalan lancar dan tepat waktu. Sengketa suban jadikan Pembentukan Muratara kembali terhambat karena DPR RI mengusulkan kasus itu harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum Musi Rawas Utara terbentuk. Blok Suban IV yang berada diantara perbatasan Kabupaten Musi Banyuasin (MUBA) dengan Kabupaten Musi Rawas, Blok Suban ini sebagaimana diatur didalam Permendagri Nomor 63 Tahun 2007 dimasukkan ke wilayah Kabupaten Musi Rawas dan sekarang masuk dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara. Terkait permasalahan batas wilayah antara Kabupaten Musi Banyuasin dengan Musi Rawas sengketa ini menjadi penghalang pembentukan kabupaten Musi Rawas Utara, melalui negosiasi yang ulet dan dukungan dari berbagai pihak akhirnya disepakati pembentukan batas wilayah tersebut, dapat diselesaikan melalui fasilitator Kementerian Dalam Negeri RI.

Komisi II DPR RI akan memasukkan agenda pembahasan DOB Kabupaten Musi Rawas Utara pada masa sidang DPR RI tanggal 13 Mei sampai Juli 2013, selanjutnya diagendakan untuk dishkan dalam sidang paripurna DPR RI. Pada tanggal 14 Juni 2013 Persetujuan itu diambil setelah Ketua Komisi II DPR Agun Gunandjar Sudarsah menyakan kepada seluruh anggota Komisi II dalam rapat kerja (raker) dengan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dan Komite I DPD, di Gedung DPR RI Senayan Jakarta. Komisi II

DPR mengupayakan pengesahan RUU Pembentukan kabupaten Muratara menjadi UU di Sidang Paripurna pada 11 Juni 2013, (Kylian, G., dan White, 2016).

Keputusan Sidang Paripurna 11 Juni 2013 yang berisi tentang keputusan pengesahan RUU tentang Pembentukan DOB Kabupaten Musi Rawas Utara menjadi Undang-undang, diambil setelah seluruh fraksi dalam rapat paripurna menyetujui usulan pembentukan kabupaten tersebut. Ketua Komisi II Agun Gunandjar mengatakan pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai bagian dari penyelenggaraan otonomi daerah yang menjamin hubungan antar daerah lainnya. Artinya mampu membangun kerja sama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah. Setelah melalui perjalanan panjang proses pembentukan kabupaten Muratara yang dirintis sejak tahun 1960 an akhirnya terbentuk dan lahir Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) Daerah Otonomi Baru (DOB), tepatnya pada hari selasa, tanggal 11 Juni 2013, Kabupaten Musi Rawas Utara, kabupaten yang ke 15 dari 19 DOB disahkan oleh Paripurna DPR RI periode 2009-2014. Kabupaten Musi Rawas Utara adalah Kabupaten /Kota ke-17 di Sumatera Selatan. Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara Di Provinsi Sumatera Selatan. Pada tanggal 10 Juli 2013 Kabupaten Musi Rawas Utara resmi terbentuk dan berdiri serta disahkan berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan, termuat dalam lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112. Bupati Muratara Drs. H. Akisropi Ayub SH, MSi, dilantik Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai pejabat Bupati Musi Rawas Utara. Pelantikan dan pengambilan sumpah dilaksanakan di Gedung Sasana Bhakti Praja lantai 3 Kemendagri Jl Medan Merdeka Utara No 7, Jakarta Pusat, pada hari rabu, tanggal 23 Oktober 2013. Pelantikan Akisropi sebagai pejabat Bupati Musi Rawas Utara berdasarkan keputusan Mendagri No. 131.16-6955 Tahun 2013. Selanjutnya pengisian anggota dan penetapan DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara pada awal tahun 2015 dan selanjutnya mempersiapkan pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Muratara untuk masa kerja lima tahun ke depan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada bulan Oktober – November 2015 Drs. H. MOH Isa Sigit SIP, MM dilantik menjadi PLH bupati Musi Rawas Utara menggantikan Drs. H. Akisropi Ayub SH, MSi. Selanjutnya November – Januari Muhamad Ali M.Si menjabat sebagai Plt Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara. Pada tanggal 30 Januari 2015 H. Agus Yudiantoro dilantik oleh Gubernur Sumatera Selatan atas nama Menteri Dalam Negeri. Pada tanggal 9 Desember masyarakat Muratara melakukan pemilihan Kepala Daerahnya untuk pertama kali dalam Sejarah kabupaten Musi Rawas Utara. H. M Syarif Hidayat dan H. Devi Suhartoni terpilih menjadi Bupati Definitive pertama di Kabupaten Musi Rawas Utara. H. M Syarif Hidayat dan H. Devi Suhartoni dilantik oleh Gubernur Sumatera Selatan atas nama Menteri Dalam Negeri pada tanggal 17 Februari 2016 di Gedung PSC Palembang Provinsi Sumatera Selatan.

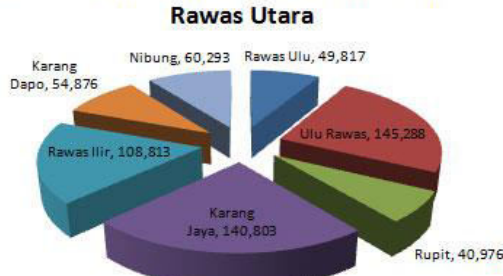
### **3. GEOGRAFIS DAN IKLIM MURATARA**

Secara geografis, letak kabupaten musu rawas utara yang merupakan salah satu kabupaten paling barat di provinsi sumatera selatan berbatasan dengan provinsi bengkulu di bagian barat, provinsi jambi di bagian utara, kabupaten musu rawas di bagian selatan dan kabupaten musu banyuasin di bagian timur. Kabupaten musu rawas utara secara keseluruhan memiliki luas wilayah 600.865,51 ha. Wilayah terluas dimiliki oleh kecamatan ulu rawas dengan luas mencapai 24,18 persen dari total luas wilayah kabupaten ini.

Lahan di kabupaten musu rawas utara paling banyak dimanfaatkan sebagai lahan pertanian bukan sawah, yang mencapai 48,45 persen dari total luas lahan. 21,75 persen diantaranya merupakan lahan perkebunan, baik yang dimiliki dan dikelola oleh rakyat maupun oleh perusahaan. Sementara itu, lahan

yang dimanfaatkan untuk sawah hanya sebesar 0,97 persen dari total luas kabupaten ini. Wilayah kabupaten musirawas utara dialiri oleh dua sungai utama yang umumnya dapat dilayari, yakni sungai rupit dan sungai rawas. Selain itu, masih terdapat sungai-sungai lainnya yang merupakan anak sungai-sungai utama tersebut. Selain memiliki sungai-sungai besar, di kabupaten ini juga terdapat beberapa danau, diantaranya danau Raya di kecamatan Rupit. Selain sebagai penampung air, danau juga merupakan potensi wisata bagi kabupaten musirawas utara.

#### Luas Lahan Kecamatan di Kabupaten Musirawas Utara



Pada Tahun 2017 persentase jumlah penduduk miskin di Kabupaten Muratara sebesar 19,49 persen, Hal ini menunjukkan angka kemiskinan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2016, sebanyak 36.460 jiwa. Berdasarkan rilis BPS Musirawas, Kabupaten Muratara tercatat angka persentase kemiskinan di tahun 2016 sebesar 20.00 persen. Kepala BPS Musirawas, Aidil Adha, penghitungan jumlah penduduk berdasar kan Garis Kemiskinan, yaitu batas kemampuan memenuhi kebutuhan dasar(basic needs approach) makanan dan non makanan yang diukur dari sisi pengeluaran, jadi Penduduk miskin adalah rata rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan, batas garis kemiskinan di kabupaten Muratara sebesar Rp. 417.875 perkapita perbulan. Artinya jika jika diilustrasikan satu Rumah Tangga yaitu ayah, ibu dan 2 orang anak menggantungkan hidup pada seorang kepala Rumah Tangga yang penghasilannya hanya Rp 1.500.000 per bulan maka Rumah Tangga itu tergolong rumah tangga miskin, hal ini berdasarkan hasil survei sosial ekonomi nasional (SUSENAS 2017) dan Survei Sosial Ekonomi Daerah (SUSEDA 2017),(Abidin. Taufik. Z., 2017).

Kepala Bappeda Muratara Erwin Syarif mengatakan penurunan kemiskinan ini dikarenakan sudah mulai berjalannya program-program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan Pemkab Muratara khususnya Bupati Muratara, Lanjutnya program yang sudah terlaksana dengan program pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin, pelayanan pendidikan bagi masyarakat miskin, pemberdayaan komunitas adat tertinggal. Begitu juga Industri pengolahan sirup jeruk, penyediaan air bersih dan mck bagi mayarakat dan program bantuan lainnya, "Meskipun program-program ini belum optimal dilakukan, namun sudah menampakkan hasil, penanggulangan kemiskinan ini tidak lah berlangsung instan seperti membalik telapak tangan, tapi semua itu harus melalui proses yang panjang, dan butuh keselarasan saling dukung antar OPD terkait,"ungkap Erwin Syarif. (Dubois, 2018).

Sementara itu Bupati Muratara H.Syarif Hidayat mengucapkan rasa syukurnya atas keberhasilan yang diperoleh Kabupaten Muratara. Apalagi yang menilai BPS. " Alhamdulillah dalam kurun waktu 2 tahun kita sdh menurunkan angka kemiskinan yg cukup signifikan,"ungkapnya. Lanjut H. Syarif Hidayat meskipun seperti diketahui bahwa angka kemiskinan di kabupaten Muratara masih sangat tinggi dan lagi Muratara masuk salah satu kabupaten tertinggal, "Namun dengan semangat Muratara Bangkit , kita jajaran Pemkab Muratara tetap berkomitmen untuk terus menekan angka kemiskinan dan melepas status Kabupaten Tertinggal, Insya Allah dgn sinergitas dan soliditas semua OPD di Muratara kemiskinan penduduk dan ketertinggalan kita ini, akan kita tuntaskan,"utaranya. (rls kominfo)

Berkaitan dengan pengembangan isu strategis pembangunan tahun 2019 ditekankan pada pendidikan dan kesehatan berkualitas serta integrasi jaminan kesehatan, pengurangan kemiskinan dan infrastruktur dan konektivitas. Peningkatan produktifitas, nilai tambah daya saing serta hilirisasi pertanian, begitu juga pasca Asian games dan reformasi birokrasi, stabilitas keamanan. Pemilu legislatif dan pemilu presiden menjadi konsen pemerintah Muratara saat ini.

Kegiatan ini sangat positif, yang nantinya dapat disinkronkan pembangunannya baik dengan provinsi maupun pusat. Enam isu strategis tadi diupayakan untuk memantapkan pertumbuhan ekonomi dan menegaskan arah pembangunan ekonomi, selain itu juga memanfaatkan kemandirian dan kesejahteraan rakyat, juga pembangunan yang berorientasi pada pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan serta pembangunan pemerintahan yang adil, jujur, bersih dan bertanggung jawab. "Hal ini berdasarkan arahan RPJPD Sumatera Selatan tahap keempat. Dengan mengacu hal tersebut kedepannya diharapkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam merancang program kegiatan prioritaskan enam isu strategis tersebut, ada sinergisitas pembangunan yang dicapai baik itu di daerah, provinsi maupun pemerintah pusat. "Sinergisitas ini akan menjadi penting dalam membangun suatu bangsa yang makmur sesuai harapan kita semua".

Dalam mensukseskan isu strategis tadi sudah beberapa program kegiatan Muratara yang sejalan. Dalam hal infrastruktur pemerintah Kabupaten Muratara baik itu Bupati Musi Rawas Utara, H. Syarif Hidayat telah meletakkan batu pertama gardu induk, tentunya ini sangat bermanfaat bagi masyarakat Muratara dalam meningkatkan pendidikan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat Musi Rawas Utara. "Insya Allah Muratara semakin maju. Kita harapkan dukungannya semua lapisan masyarakat" (rls kominfo)

#### 4. POTENSI LOKAL PENYANGGA PEREKONOMIAN

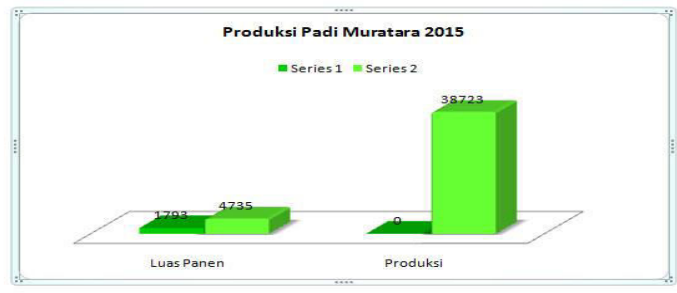
Kabupaten musirawas utara telah lama dikenal sebagai daerah penghasil tanaman perkebunan khususnya karet dan kelapa sawit, baik perkebunan rakyat maupun perkebunan besar yang dikelola oleh perusahaan. Komoditas karet yang diupayakan oleh rakyat menghasilkan hasil panen sebanyak 127.040 ton. Sementara itu, komoditas kelapa sawit yang diupayakan oleh rakyat yang menghasilkan hasil panen sebanyak 107.471 ton. Kondisi tanah dan iklim yang cocok merupakan salah satu faktor pendukung kondisi tersebut. Karet dan kelapa sawit merupakan dua komoditas perkebunan potensial yang dihandalkan di kabupaten Muratara dengan luas areal tanam sebesar 66.595,00 ha dan hasil produksi mencapai 6623.293,00 ton. Untuk potensi unggulan karet dengan luas areal tanam 6.520,00 ha dan yang dapat menghasilkan 7.216,00 ton per tahunnya. Perkebunan ini meliputi perkebunan plasma yang dikelola oleh penduduk lokal dan perusahaan yang dikelola perusahaan pengelola seperti pt. London sumatra, pt. Maju perkasa sawit, pt. Indo kebun unggul. Potensi tanaman unggul tersebut dapat mengatasi dampak ekonom sehingga mampu meningkatkan nilai produksi dan dapat memberikan nilai tambah serta menyerap banyak tambahan tenaga kerja. Selain karet dan kelapa sawit, di kabupaten Musi Rawas Utara juga diusahakan komoditas perkebunan lain, seperti kelapa, kopi, kayu manis, pinang dan kemiri.

Kelompok Hutan (1)	Fungsi Hutan (2)	Luas (Ha) (3)
01. Hutan tetap/ Kawasan Non-Budidaya	- Hutan Suaka Alam (HSA)	236315,66
	- Hutan Lindung	1954, 41
<b>Jumlah</b>		<b>238270,07</b>
02. Hutan/ Kawasan Budidaya	- Hutan Produksi terbatas (HPt)	31.724,08
	- Hutan Produksi Tetap (HP)	148.210,81
	- Hutan Produksi Konversi (HPKv)	9.481,16
	<b>Jumlah</b>	

Sumber: Bidang Inventarisasi dan Tata Guna Hutan (INTAG) Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Rawas Ket. data masih tergabung dengan Kabupaten Musi Rawas

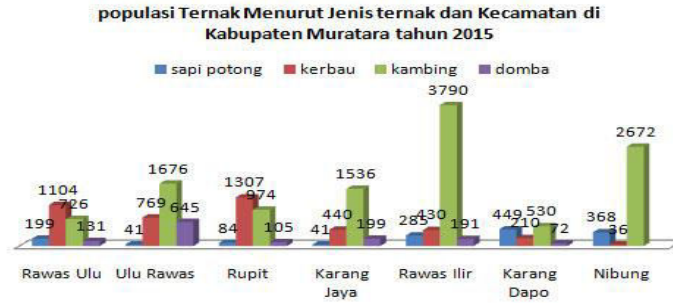
Keberadaan hutan di Kabupaten Musi Rawas yang termasuk dalam kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat membuat kabupaten ini menjadi salah satu wilayah penyangga (buffer) di Provinsi Sumatera Selatan. Selain keuntungan ekologis yang dimilikinya, kawasan hutan juga dapat memberikan dampak ekonomis bagi kabupaten Musi Rawas. Dari total luas hutan 604.020,92 Ha di kabupaten ini, seluas 365.750,85 (60,55 persen) merupakan hutan/kawasan budidaya yang dimanfaatkan sebagai hutan produksi untuk untuk perusahaan tanaman kehutanan seperti kayu-kayuan, sedangkan sisanya berupa hutan teta/kawasan non budidaya. Komoditas kehutanan berupa kayu-kayuan yang mempunyai produksi paling besar ditahun 2015 adalah kayu dari jenis akasia, dengan produksi 45,50 ton.

Pada tahun 2015 Luas panen (ha) dan produksi (ton) padi sawah dan padi ladang di kabupaten musu rawas utara produksi padi sawah di kabupaten musu rawas utara sebesar 24.461 ton dari luas panen sebesar 6.048 ha, sedangkan untuk komoditas padi ladang, produksi sebesar 14.082 ton dari luas panen sbesar 4.735. Selain tanaman padi, di kabupaten musu rawas utara juga ditanam tanaman palawija seperti ketela pohon, ketela rambat, kacang hijau, kacang kedelai, jagung, dan kacang tanah.





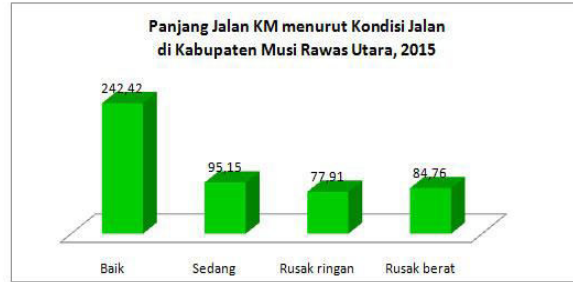
Populasi sapi potong di kabupaten musi rawas utara tahun 2015 adalah sebanyak 1.467 ekor, sedangkan kerbau sebanyak 4.269 ekor. Dari kelompok ternak kecil, populasi kambing dan domba di kabupaten ini pada tahun 2015 yakni sebanyak 11.994 ekor dan 1.342 ekor. Sementara dari kelompok ternak unggas, populasi terbanyak berasal dari jenis ayam buras, yakni 179.603 ekor, diikuti oleh jenis ayam ras pedaging (127.200 ekor) dan itik/entok (37.070 ekor).



Kabupaten musi rawas utara wilayahnya yang banyak dilalui oleh sungai-sungai besar mendukung potensi dalam subsektor perikanan, terutama perikanan air tawar, baik perikanan tangkap maupun budidaya. Produksi perikanan kabupaten musi rawas utara pada tahun 2015 tercatat 17 ton untuk jenis perikanan budidaya, dan 385,52 ton untuk jenis perikanan tangkap.

Kecamatan	Budidaya		Tangkap		Jumlah	
	Prod/ (Ton)	Nilai/ (Rp.000)	Prod/ (Ton)	Nilai/ (Rp.000)	Prod/ (Ton)	Nilai/ (Rp.000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Rawas Ulu	1,5	2.230.000	-	-	1,5	2.230.000
2. Ulu Rawas	0,25	5.610.000	-	-	0,25	5.610.000
3. Rupit	2,86	214.480.000	-	-	2,86	214.480.000
4. Karang Jaya	5,21	155.300.000	-	-	5,21	155.300.000
5. Rawas Ilir	4,7	118.560.000	-	-	4,7	118.560.000
6. Karang Dapo	2	18.744.000	-	-	2	18.744.000
7. Nibung	-	-	-	-	-	-

Pada tahun 2015, panjang jalan kabupaten dan jalan desa di wilayah Kabupaten Musi Rawas mencapai 500,24 km, dari total panjang jalan kabupaten 242,42 km dalam keadaan baik 95,15 km dalam keadaan sedang 77,91 km rusak, dan 84,76 km rusak berat. Banyaknya jembatan yang ada di wilayah kabupaten musi rawas utara sebanyak 137 jembatan dengan panjang total jembatan 2151 meter yang tersebar di seluruh kecamatan. Kecamatan rawas ulu memiliki paling banyak jembatan, ada 39 jembatan dengan panjang seluruh jembatan 490,9 meter. Sedangkan kecamatan karang dapo tercatat memiliki panjangseluruh jembatan terpanjang, dengan total panjang jembatan 579,3 meter dari hanya 23 jembatan



## 5. KESIMPULAN

Perjalanan panjang pembentukan daerah Otonom baru (DOB) Muratara, mencapai titik terang, Peta batas Muratara dengan Mura dan Provinsi Jambi, sudah selesai. Masyarakat yang diberikan keterampilan sesuai dengan minat menjadi duta pada sektor lahan masing-masing. Ditambah dengan pendampingan yang intensif akan melahirkan pejuang-pejuang ekonomi daerah yang tangguh. Perencanaan pembangunan berdasarkan perwilayahan komoditas dapat mengatasi persaingan jenis komoditas antar wilayah. Identifikasi dan analisa potensi wilayah perlu dilakukan awal dalam rangka pengembangan ekonomi wilayah yang merupakan informasi awal dalam merumuskan atau mempersiapkan strategi pengembangan potensi yang ada.

Karet dan kelapa sawit merupakan dua komoditas perkebunan potensial yang dihandalkan di kabupaten Muratara dengan luas areal tanam sebesar 66.595,00 ha dan hasil produksi mencapai 6623.293,00 ton. Untuk potensi unggulan karet dengan luas areal tanam 6.520,00 ha dan yang dapat menghasilkan 7.216,00 ton per tahunnya. Perkebunan ini meliputi perkebunan plasma yang dikelola oleh penduduk lokal dan perusahaan yang dikelola perusahaan pengelola seperti pt. London sumatra, pt. Maju perkasa sawit, pt. Indo kebun unggul. Potensi tanaman unggul tersebut dapat mengatasi dampak ekonom sehingga mampu meningkatkan nilai produksi dan dapat memberikan nilai tambah serta menyerap banyak tambahan tenaga kerja.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Taufik. Z. (2017). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengembangan Sektor Potensial Di Kabupaten Asahan. *QE Jurnal*, 02(01), 19–33.
- Dubois, F. (2018). Behavior during Earthquake. *Journal of Disaster Mitigation*, 03, 89–94,.
- Kylian, G., dan White, A. (2016). *Structural & Earthquake Engineering, 5nd Edition*,. USA: Warehouse Publisher.